

## KPK Dalami Aset Eks Mentan SYL yang Diduga Pakai Nama Keluarga

JAKARTA (IM) – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa adik Syahrul Yasin Limpo (SYL), Andi Tenri Angka Yasin Limpo, sebagai saksi dalam kasus dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang menjerat eks Menteri Pertanian (Mentan) SYL, Rabu (12/6).

Dari keterangan Andi Tenri, penyidik KPK mengorek informasi soal aset eks SYL yang diduga digunakan meakan nama keluarga.

"Penyidik mendalami informasi tentang kepemilikan aset-aset SYL yang diduga diatasnamakan keluarga," kata tim juru bicara KPK, Budi Prasetyo melalui pesan singkatnya yang dikutip Kamis (13/6).

Sebelumnya, Andi Tenri selesai menjalani pemeriksaan kemudian terlihat keluar dari Gedung Merah Putih KPK pada pukul 16.06 WIB, Rabu (12/6/2024).

Saat keluar, Andi Tenri memilih irit bicara ketika diberi sejumlah pertanyaan

oleh awak media. "Nggak ada," saat ditanya soal adanya aset SYL yang dikelola dirinya.

Kemudian, pengacara keluarga SYL, Sindu meminta untuk menanyakan pemeriksaan tersebut ke penyidik. "Semua keterangan sudah disampaikan ke penyidik, jadi mohon maaf kami tidak bisa menjelaskan karena semua keterangan itu sudah disampaikan ke penyidik," ujarnya.

Perlu diketahui, SYL ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pemerasan dan gratifikasi di lingkungan Kementerian Pertanian (Kementan).

Dalam perkara tersebut, KPK juga menetapkan Sekjen Kementan, Kasdi Subagyo dan Direktur Alat dan Mesin Kementan, Muhammad Hatta sebagai tersangka. Ketiganya pun saat ini menjadi terdakwa dalam kasus tersebut yang rangkaian sidangnya digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta. ● han

## Ngaku Masih Trauma, Staf Sekjen PDIP Minta KPK Menunda Pemeriksaannya

Pengacara Kusnadi mengatakan, pihaknya berencana melaporkan penggeledahan yang dilakukan KPK kepada Kusnadi ke Bareskrim Polri.

JAKARTA (IM) - Kuasa hukum Kusnadi, Ronny Talapessy menyebut, kliennya belum bisa memenuhi panggilan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) karena masih trauma setelah sebelumnya digeledah dan dibentak penyidik.

Kusnadi merupakan staf Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDI-P Hasto Kristiyanto. Ia sebelumnya digeledah penyidik ketika Hasto menjalani pemeriksaan sebagai saksi Harun Masiku, Senin (10/6).

KPK kemudian kembali memanggil Kusnadi untuk diperiksa sebagai saksi Harun pada Kamis (13/6).

"Beliau masih trauma

atas perlakuan yang diterima saat digeledah dan dirampas barang-barang milik pribadi yang tidak ada kaitannya dengan perkara Harun Masiku," kata Ronny saat dihubungi wartawan, Kamis (13/6).

Keberatan digeledah KPK, Kusnadi kemudian melaporkan penyidik ke Dewan Pengawas (Dewas) KPK hingga Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM). Pengacara Kusnadi mengatakan, pihaknya berencana melaporkan penggeledahan itu ke Bareskrim Mabes Polri.

Juru Bicara PDI-P Chico Hakim mengatakan, Kusnadi diinterogasi penyidik selama sekitar tiga jam. Padahal, saat

itu ia tidak dipanggil KPK.

"Kusnadi juga digeledah badannya dan dihujani banyak pertanyaan dengan cara yang intimidatif dengan menggunakan diksi-diksi yang intimidatif selama kurang lebih 3 jam," kata Chico dalam keterangan tertulis yang diterima wartawan pada Selasa (11/6).

Menanggapi keberatan tersebut, Wakil Ketua KPK, Alexander Marwata menyilakan pihak Hasto menempuh prosedur keberatan yang telah disediakan undang-undang. Mereka bisa melapor ke Dewan Pengawas KPK atau mengugat praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

"Kalau keberatan kan ada mekanisme untuk menyampaikan keberatan ke Dewas (Dewan Pengawas) silakan atau mengajukan praperadilan," kata Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata saat ditemui di kantornya, Jakarta, Rabu (12/6). ● han

## Usut Korupsi Pengadaan Lahan DKI di Rorotan, KPK Cegah 10 Orang

JAKARTA (IM) - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mencegah 10 orang bepergian ke luar negeri. Pencegahaan tersebut terkait dengan dugaan korupsi pengadaan lahan di Rorotan, Cilincing, Jakarta Utara.

Anggota Tim Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, mengatakan, proyek pengadaan lahan itu dilakukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda)

Pembangunan Sarana Jaya, perusahaan Badan Usaha Milik Dserah (BUMD) Provinsi DKI Jakarta.

"Pada tanggal 12 Juni 2024, KPK telah mengajukan larangan bepergian ke luar negeri untuk enam bulan ke depan pada 10 orang," kata Budi dalam keterangannya kepada wartawan, Kamis (13/6).

Adapun 10 orang tersebut adalah pihak swasta berini-

sial ZA, Karyawan swasta berinisial MA dan NK, wiraswasta berinisial FA, LS, dan M. Kemudian Manager PT CIP berinisial DBA dan PS, Notaris berinisial JBT dan pengacara berinisial SSG. Budi membenarkan, kasus ini merupakan pengembangan dari perkara rasuah yang menjerat mantan Direktur Utama Perumda Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Cornelis. ● han



## Peningkatan Kinerja Bappenda Kabupaten Bogor Tahun 2024

Dalam rangka memperingati Hari Jadi Bogor (HJB) Ke-542 Tahun 2024, Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPPENDA) Kabupaten Bogor telah menyelenggarakan kegiatan Gebyar Pembayaran Pajak Daerah yang berorientasi untuk menarik Wajib Pajak (WP) dalam melakukan kewajibannya membayar pajak. Kegiatan dilaksanakan di Ruang Pelayanan Bappenda Kabupaten Bogor pada

Hari Kamis Tanggal 30 Mei 2024, Wajib Pajak yang datang secara langsung untuk melakukan pembayaran pajak mendapatkan souvenir dan berkesempatan memenangkan *doorprize* yang menarik. Kegiatan tersebut mendapatkan respon yang positif dari Wajib Pajak sehingga realisasi pembayaran pajak yang diterima pada hari tersebut sangat signifikan, yakni Rp 6.435.181.685,00, jauh lebih tinggi dari rata-rata penerimaan harian sebesar Rp 1.849.624.042,00.

Pada Tahun Anggaran 2024 ini Bappenda memiliki tujuan "Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (PAD)", dengan indikator tujuan yaitu **Pendapatan Asli Daerah (PAD)**, dari tujuan dimaksud maka Bappenda memiliki Sasaran "Meningkatnya Pajak Daerah", dengan Indikator sasaran yaitu **Persentase Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah** dengan Target sebesar 70,96 %.

Arah kebijakan dan strategi-strategi yang dilaksanakan Bappenda dalam Tahun Anggaran 2024 ini berorientasi terhadap peningkatan penerimaan pendapatan pajak daerah dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat terutama para wajib pajak. Penerimaan realisasi pajak daerah dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, selalu mengalami peningkatan dalam setiap tahunnya, demikian juga kualitas pelayanan meningkat seiring dengan pengembangan inovasi-inovasi yang telah dilakukan oleh Bappenda Kabupaten Bogor.

Dalam menyusun strategi untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Kabupaten Bogor, dalam hal ini Bappenda melakukan antara lain Peningkatan cakupan atau ekstensifikasi dan intensifikasi penerimaan PAD. Kegiatan ini merupakan Upaya memperluas cakupan penerimaan pendapatan.

Dalam usaha peningkatan cakupan dimaksud, ada tiga hal penting yang harus diperhatikan adalah:

1. Menambah objek dan subjek pajak dan retribusi;
2. Peningkatan besarnya penetapan;
3. Mengurangi tunggakan.

Karena masih belum optimalnya Upaya intensifikasi dan ekstensifikasi yang dilakukan diatas, maka Bappenda Kabupaten Bogor melakukan beberapa strategi yang diperlukan, antara lain:

1. Melakukan pendataan ulang terhadap wajib pajak, yang bertujuan meningkatkan pendapatan pajak daerah;
2. Menjalinkan kerjasama dengan pihak swasta, BUMD dalam pengelolaan maupun pemungutan pajak daerah;
3. Melakukan monitoring rutin dan evaluasi;
4. Meningkatkan komitmen seluruh *stakeholder* agar dapat

terlaksananya strategi peningkatan PAD;

5. Menyelenggarakan sistem komputerisasi penerimaan daerah;
6. Pembuatan Tim PAD lintas sektor.

Strategi-strategi tersebut berdampak

terhadap meningkatnya penerimaan pajak daerah di Wilayah Kabupaten Bogor, hal tersebut dapat dilihat pada pencapaian kinerja Bappenda Kabupaten Bogor pada sektor penerimaan Pajak Daerah s.d 31 Mei 2024 dibawah ini.

### CAPAIAN PENERIMAAN PAJAK DAERAH S.D 31 MEI 2024

Pencapaian realisasi pajak daerah untuk 10 jenis pajak daerah sampai dengan tanggal 31 Mei 2024 adalah sebesar **Rp 1.037.576.332.840,00** atau **36,64 %** dari target yang telah ditetapkan dalam Anggaran Tahun 2024 sebesar Rp 2.831.535.400.000,00 dengan rincian realisasi penerimaan sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi Penerimaan Pajak Daerah s.d 31 Mei 2024				
No	Jenis Pajak	Target 2024 (Rp)	Realisasi (Rp) 31 Mei 2024	Persentase Capaian
1	Pajak Reklame	28.415.110.000	12.343.852.452	43,44 %
2	Pajak Air Tanah	72.440.860.000	27.149.928.955	37,48 %
3	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	122.040.128.000	45.270.885.684	37,10 %
4	Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2)	640.586.111.000	215.379.179.497	33,62 %
5	Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	990.227.628.000	320.409.921.131	32,36 %
6	PBJT - Restoran	360.633.732.000	145.880.195.128	40,45 %
7	PBJT - Tenaga Listrik	376.582.300.000	169.472.579.717	45,00 %
8	PBJT - Hotel	151.629.301.000	61.540.909.174	40,59 %
9	PBJT - Parkir	8.333.241.000	5.786.926.554	69,44 %
10	PBJT - Hiburan	80.646.989.000	34.341.954.548	42,58 %

Penerimaan realisasi pajak daerah di Kabupaten Bogor dari 10 jenis pajak yang dikelola Bappenda Kabupaten Bogor, paling besar berkontribusi dari Pajak Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dengan capaian Rp 320.409.921.131,00 dan Kedua terbesar dari Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) dengan capaian Rp 215.379.179.497,00 sebagaimana tergambar pada diagram realisasi pajak daerah di bawah ini.



Realisasi penerimaan pajak daerah masih akan bertambah penerimaannya sampai dengan akhir tahun per tanggal 31 Desember 2024, karena masa jatuh tempo pembayaran pajak selain PBB-P2 dibayarkan paling lambat per tanggal 15 Desember 2024, sedangkan masa jatuh tempo pembayaran PBB-P2 di Bulan Agustus.

Pada Tahun 2024 Kabupaten Bogor kembali mengeluarkan Kebijakan Relaksasi Pajak Daerah yang dapat dimanfaatkan oleh Wajib Pajak, berdasarkan Peraturan Bupati Bogor Nomor 9 Tahun 2024 tentang Pemberian Penghapusan Sanksi Administratif Piutang Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan sampai dengan Tahun Pajak 2023, yaitu:

### Penghapusan Denda untuk PBB P2 tahun pajak s/d 2023 periode bayar 1 Juni – 31 Agustus 2024

Dengan dikeluarkannya kebijakan Relaksasi Pajak Daerah Tahun 2024 diharapkan dapat mengoptimalkan pendapatan pajak di Kabupaten Bogor, sehingga penerimaan pajak daerah Kabupaten Bogor dapat semakin meningkat sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.



Para unsur Pimpinan Bappenda dan Pengurus Dharma Wanita Persatuan (DWP) unit Bappenda Kabupaten Bogor dalam rangka menyambut Masyarakat/Wajib Pajak yang datang secara langsung ke Kantor Bappenda di Jalan Tegar Beriman dalam melakukan kewajibannya membayar pajak.



Penyerahan Souvenir dan Doorprize oleh Para Pimpinan Bappenda Kabupaten Bogor kepada Wajib Pajak yang mendapatkannya.



Penyerahan Souvenir dan Doorprize oleh Para Pengurus DWP Unit Bappenda Kabupaten Bogor kepada Wajib Pajak yang mendapatkannya.